

# ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SD BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH DI KOTA CIREBON

Oleh:

Devi Nuranti

SDN Silih Asah II Kota Cirebon

(e-mail: [dvnuranti@gmail.com](mailto:dvnuranti@gmail.com))

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebutuhan ruang kelas sekolah dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah dan membandingkan dengan SPMP dan SNP. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan perhitungan proyeksi. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, input data dan pengolahan data menggunakan metode proyeksi dengan *mathematical equations approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia sekolah menjadi faktor penentu kebutuhan ruang kelas. RKB yang dibutuhkan pada tahun 2015/2016 sebanyak 199 unit, dan ruang kelas rehabilitasi sebanyak 50 unit. Penentuan estimasi biaya pembangunan satu unit RKB menggunakan harga satuan PU dan harga perkiraan sendiri (HPS) pemerintah kota Cirebon yang ditetapkan oleh peraturan dari dinas PU. Penentuan anggaran pembangunan RKB dan rehabilitasi bersumber dari APBD dan APBN melalui bantuan DAK.

Kata Kunci : *Social Demand*, Proyeksi, Ruang kelas, Penduduk usia sekolah

## ABSTRACT

*This research aims to describe and analyze the needs of primary school classrooms based on the projected growth of the school age population and compares with SPMP and SNP. This research was conducted in Department of Education in Cirebon City, using descriptive qualitative research method with projection calculations. Data collection techniques using primary data and secondary data sources, through interviews, observation and documentation study. Data analyzing techniques using data collection, data input and data processing using the projection method with Mathematical Equations Approach. The results showed that the growth of the school age population became one of the determinants of classroom space requirements. RKB is needed in the year 2015/2016 as many as 199 units, and classroom rehabilitation of 50 units. The determination of the estimated cost of construction of one unit RKB using PU unit price and price estimate of its own (HPS) of Cirebon city government established by the regulations of the Department of Public Works. Determination of budget development RKB and rehabilitation sourced budget as government obligations of Cirebon city RKB from the APBD budget, and help budgeting of special allocation fund (DAK) from APBN budget.*

*Key Words : Social Demand, Projection, classroom, school age-population.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan kebutuhan dasar bagi negara berkembang (Talpur et al, 2014). Melalui pendidikan peningkatkan kualitas kehidupan warga negara akan meningkat, maka pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Implementasi tiga prioritas pembangunan pendidikan nasional, meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan

pencitraan publik, menghendaki agar pemerintah memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah NKRI, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan pendidikan di daerah. Permasalahan yang muncul dalam pelayanan pendidikan adalah kemudahan dalam akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan prasarana fisik pendidikan di berbagai daerah (Lasker, at all, 2001).

Ketersediaan prasarana pendidikan merupakan faktor pertama yang menjadi perhatian

dalam pembangunan sosial ekonomi (Aref, tahun 2011). Dengan kata lain pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan salah satunya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Dalam pemenuhan kedelapan standar ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Upaya pemerintah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan ini dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Setelah semua sekolah telah dapat memenuhi SPM, maka standar minimal ini akan ditingkatkan secara berkala sampai semua sekolah telah memenuhi SNP (Kemdikbud, 2011). Sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP No.19 tentang SNP, pada pasal 1, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian sarana dan prasarana lebih jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, yaitu Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan pendidikan termasuk ruang kelas (Santoso, 2012).

Pemenuhan prasarana merupakan bagian penting dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Saud, 2013). Perencanaan merupakan unsur dan fungsi pertama dari manajemen yang

telah dikemukakan oleh berbagai ahli administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Adams (2006, hlm 5) :

*Planning is an almost ubiquitous activity, engaged in by individuals, organizations, communities, and nations. It is pursued for a variety of purposes in a variety of ways, depending on what is being planned, who is doing the planning, and what assumptions are being made about the context and constraints of planning.*

Fungsi dari perencanaan adalah alat bagi pengembangan *quality assurance*, perencanaan yang benar dan tepat akan memberikan jaminan bagi mutu pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan meliputi berbagai aspek kegiatan dalam pendidikan, begitu pula dalam hal perencanaan yang sifatnya pembangunan fisik, atau fasilitas pendidikan, perencanaan yang dilakukan bersifat *middle range* dan *long range* dengan jangka perencanaan lima, sepuluh, lima belas dan dua puluh tahun yang akan datang (Banghart & Trull, 1990). Hal ini sejalan dengan Kumar (2004, hlm 142) "*educational planning in physical terms plans of school building, layout of school building and their proper setting establishing environmental criteria for learning activities*".

Perencanaan pendidikan memiliki empat pendekatan (Saud, 2013) yaitu: pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*); pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*); dan pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*) dan pendekatan integratif (pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik).

Perencanaan yang menggunakan pendekatan *social demand* merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk mengatasi pemerataan akses pendidikan dalam pemenuhan SPMP dan SNP. Seperti pendapat Kumar (2004, hlm 143) "*The estimates of the social demand based upon the demographic trends, an also based upon the transition probabilities of enrolment, the admission rates, the retention rules do and wastage roles etc. at different level of education*". Jadi, dasar dari perencanaan pendidikan dasar adalah dengan pendekatan *social demand* yang dasarnya adalah pertumbuhan penduduk usia sekolah (PUS), artinya perencanaan ini didasarkan pada tren kependudukan. Dalam menghitung jumlah pertumbuhan PUS, menggunakan metode dengan teknik proyeksi. Proyeksi adalah inti dari perencanaan pendidikan karena proyeksi berfungsi untuk mengkonversi tujuan dicari dalam

skenario kuantitatif. Menurut Unesco (2010, hlm.3) :

*Projection techniques are at the core of educational planning as they serve to convert the sought objectives into quantifiable scenarios. They are requisite tools for policy dialogue and the formulation of educational strategies. Projections and simulation models make it possible to translate the requisite tasks into calculations of the financial, physical and human resources required.*

Dengan kata lain, proyeksi merupakan alat yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan perumusan strategi pendidikan. Proyeksi memungkinkan untuk menerjemahkan tugas yang diperlukan dalam perhitungan keuangan, fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Proyeksi PUS dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu kawasan, yang digunakan sebagai data dasar dalam menghitung kebutuhan ruang belajar atau RKB yang dibutuhkan, kemudian mengestimasi jumlah biaya pembangunan per unit ruang kelas yang dibutuhkan oleh SD yang sesuai dengan kriteria SNP.

Perubahan penduduk yang terus terjadi akan menciptakan perubahan kebutuhan sosial dalam pendidikan. Akibatnya akan memunculkan perubahan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan, hal ini sejalan dengan pendapat Dash dan Dash (2008, hlm 22) *“a pressing demand for further expansion of educational facilities the social demand puts emphasis on planning and streamlining educational expiation on the basic of demands in the society”*. Kebutuhan akan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, menjadi masalah di berbagai daerah, dan menjadi kewajiban pemerintah daerah yang wajib untuk dipenuhi (Asadullah, 2009).

Berdasarkan studi pendahuluan, penelitian ini menerapkan pendekatan *social demand* dalam perencanaan prasarana pendidikan dan yang menjadi kajian adalah kota Cirebon. Data penduduk kota Cirebon menunjukkan, jumlah penduduk usia masuk SD pada setiap tahunnya mengalami perubahan, terlihat dari data Disdukcapil kota Cirebon tahun 2010 sebanyak 10125 jiwa dan tahun 2014 sebanyak 10504 jiwa. Hal ini menyebabkan perlunya perencanaan dan analisis berdasarkan penduduk usia sekolah agar dapat memproyeksikan jumlah peserta didik baru yang akan berdampak pada jumlah rombongan belajar dan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan selama lima tahun yang akan datang.

Kesenjangan antara jumlah kelas yang ada dengan jumlah rombongan belajar pada setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2014/2015 jumlah rombel yang ada sebanyak 1187 rombel sedangkan kelas yang tersedia hanya 1081 ruang kelas dengan kondisi fisik bangunan ruangan baik sebanyak 813, rusak ringan sebanyak 114, rusak sedang sebanyak 50, dan rusak berat sebanyak 50 ruangan. Dari data ini maka kota Cirebon masih kekurangan ruang kelas sebanyak 106 ruang kelas baru dan ruang kelas rehab rusak berat sebanyak 50 unit. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan standar baik SPM dan SNP yang mewajibkan rasio ruang kelas dengan rombel adalah 1:1, dengan ketentuan jumlah peserta didik yang berjumlah 28 orang perkelas, dan SPM dengan rasio 1: 32, artinya jumlah siswa 32 orang/kelas/rombel. Masalah ini akan terus berlanjut apabila tidak dibuat perencanaan yang tepat untuk mengatasinya.

Dari pembahasan dan data, sangat jelas nampak bahwa perubahan jumlah penduduk usia sekolah, akan merubah pula jumlah peserta didik baru yang akan terserap di sekolah dasar, yang akan berdampak pula pada jumlah kebutuhan RKB yang harus direnovasi dan dibangun, serta jumlah biaya per unit RKB yang harus disiapkan oleh Pemerintah daerah kota Cirebon. Dengan membuat prediksi yang akurat akan membantu Dinas Pendidikan membuat rencana strategis dalam pemenuhan SPM dan pencapaian SNP, yang berdampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, berikut :

1. a. Berapa proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon tahun 2015-2019?  
b. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia sekolah (7-12) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?  
c. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?  
d. Berapa jumlah peserta didik keseluruhan berdasarkan APK pada tahun 2015-2019?
2. Berapa proyeksi jumlah peserta didik baru yang terserap oleh SD, pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
3. Berapa jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
4. Berapa estimasi jumlah biaya ruang kelas sekolah dasar yang diperlukan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?

5. Bagaimana pengadaan anggaran ruang kelas sekolah dasar di kota Cirebon pada tahun

2015 sampai tahun 2019?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan perhitungan proyeksi. Dengan metode ini diharapkan diperoleh data yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu dan saat ini untuk selanjutnya disetiasi/diperkirakan kecenderungan untuk beberapa tahun yang akan datang, khususnya untuk tahun 2015/2016 sampai pada tahun 2019/2020.

Dalam penelitian ini penulis tidak berusaha membuktikan hubungan antar variabel penelitian. Data yang tidak tersedia atau belum lengkap serta untuk mengkonfirmasi kebenaran data dari sumber data sekunder selanjutnya digali melalui wawancara dan observasi yang kemudian dalam penelitian ini disebut sebagai data primer. Penggunaan data sekunder seperti laporan hasil sensus dan dokumen lain dari dinas pendidikan dan dinas kependudukan dan catatan sipil (Tre'panier et al, 2008; Stopher&Greaves, 2007; Talpur et al 2014, Subekti, 2014).

Untuk mengolah data dalam penelitian ini digunakan persamaan matematis atau *mathematical equation approach* (Unesco, 2010; J.Bayou, 2005; Grip, 2004) .

Adapun rumus yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Sprague *Multiplier*, untuk memecah memecah penduduk usia lima-tahunan menjadi usia tahunan. Rumus yang digunakan sebagai berikut :
  - a) Usia 6 tahun :  $F_b = (S_{1b} \times F_{-1}) + (S_{2b} \times F_0) + (S_{3b} \times F_1) + (S_{4b} \times F_2), \dots$  persamaan (3.1)
  - b) Usia 7 tahun :  $F_c = (S_{1c} \times F_{-1}) + (S_{2c} \times F_0) + (S_{3c} \times F_1) + (S_{4c} \times F_2), \dots$  persamaan (3.2)
  - c) Usia 8 tahun :  $F_d = (S_{1d} \times F_{-1}) + (S_{2d} \times F_0) + (S_{3d} \times F_1) + (S_{4d} \times F_2), \dots$  persamaan (3.3)
  - d) Usia 9 tahun :  $F_e = (S_{1e} \times F_{-1}) + (S_{2e} \times F_0) + (S_{3e} \times F_1) + (S_{4e} \times F_2), \dots$  persamaan (3.4)
  - e) Usia 10 tahun :  $(F_a = S_{1a} \times F_{-2}) + (S_{2a} \times F_{-1}) + (S_{3a} \times F_0) + (S_{4a} \times F_1) + (S_{5a} \times F_2),$  persamaan (3.5)
  - f) Usia 11 tahun :  $F_b = (S_{1b} \times F_{-2}) + (S_{2b} \times F_{-1}) + (S_{3b} \times F_0) + (S_{4b} \times F_1) + (S_{5b} \times F_2),$  persamaan (3.6)
  - g) Usia 12 tahun :  $F_c = (S_{1c} \times F_{-2}) + (S_{2c} \times F_{-1}) + (S_{3c} \times F_0) + (S_{4c} \times F_1) + (S_{5c} \times F_2),$  persamaan (3.7).

- 2) Laju pertumbuhan penduduk yaitu :  $r = \frac{1}{t} \ln (P_t/P_0), \dots$  persamaan (3.8).
- 3) Proyeksi penduduk yaitu :  $P_n = P_0 \times (1 + r)^n, \dots$  persamaan (3.9)
- 4)  $APK = E/P \times 100, \dots$  persamaan (3.10)
- 5) Proyeksi Peserta Didik :  $PPD_t = (APK_{t_0 + \text{penurunan}} \times \text{APK}_{\text{rata-rata}} / 100) \times PUS(7-12)_{t_0}$  persamaan (3.11)
- 6)  $ASK : SB_n / P_{(6+7)} \times 100, \dots$  persamaan (3.12)
- 7) Proyeksi Siswa Baru berdasarkan APK adalah  $PSBI = (ASK_t / 100) \times (P_{6+7})_t,$  persamaan (3.13)
- 8) Rumus Siswa berdasarkan komposisi setiap kelas berdasarkan APK dan flow rate adalah :
  - a)  $PSI_t = PSBI_t + (AU_t / 100) \times SI_{t-1}, \dots$  persamaan (3.14)
  - b)  $PSII_t = (ANII_t / 100 \times SII_{t-1}) + (AUII_t / 100) \times SII_{t-1}, \dots$  persamaan (3.15)
  - c)  $PSIII_t = (ANIII_t / 100 \times SIII_{t-1}) + (AUIII_t / 100) \times SIII_{t-1}, \dots$  persamaan (3.16)
  - d)  $PSIV_t = (ANIV_t / 100 \times SIV_{t-1}) + (AUIV_t / 100) \times SIV_{t-1}, \dots$  persamaan (3.17)
  - e)  $PSV_t = (ANV_t / 100 \times SV_{t-1}) + (AUV_t / 100) \times SV_{t-1}, \dots$  persamaan (3.18)
  - f)  $PSVI_t = (ANVI_t / 100 \times SVI_{t-1}) + (AUVI_t / 100) \times SVI_{t-1}, \dots$  persamaan (3.19)
  - g)  $PS_t = PSI_t + PSII_t + PSIII_t + PSIV_t + PSV_t + PSVI_t, \dots$  persamaan (3.20)
- 9) Kebutuhan Ruang kelas berdasarkan SPMP yaitu :

$$\boxed{\sum \text{Ruang Kelas} = \sum \text{Rombel} = \sum \text{Peserta Didik} : 32 \text{ siswa}}$$

.....Persamaan (3.21)

- 10) Kebutuhan Ruang kelas berdasarkan SNP yaitu :

$$\boxed{\sum \text{Ruang Kelas} = \sum \text{Rombel} = \sum \text{Peserta Didik} : 28 \text{ siswa}}$$

.....Persamaan (3.22)

- 11) Estimasi biaya :
  - a)  $RKB_n = n \times HPS$  ..... Persamaan (3.23),
  - b) Rehab  $RB_n = n \times HPS \times 65\%, \dots$  Persamaan (3.24),
  - c)  $BR = (BKR \times \text{Hasat PU} \times \text{JRK}) + \text{Perabot}$ . Persamaan (3.25)

a. *Proyeksi Jumlah Penduduk Total, PUS (7-12) tahun, PUMS (6-7), Peserta Didik Baru berdasarkan APK kota Cirebon tahun 2015-2019*

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 394435 orang, pada tahun 2016 proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 410212 orang, pada tahun 2017 proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 426620 orang, pada tahun 2018 proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 443686 orang, pada tahun 2019 proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 461433 orang. Kenaikan jumlah penduduk kota Cirebon terlihat sangat besar, hal ini karena angka laju pertumbuhan penduduk mencapai 4% pertahun.

Jumlah proyeksi penduduk usia sekolah yang akan terserap oleh pendidikan dasar baik, sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta dan madrasah ibtidaiyah di kota Cirebon pada tahun 2015 sejumlah 38478 jiwa, pada tahun 2016 sejumlah 39363 jiwa, pada tahun 2017 sejumlah 40268 jiwa, pada tahun 2019 sejumlah 41194 jiwa, pada tahun 2019 sejumlah 42141 jiwa.

Dimana, PPD<sub>2015</sub> adalah proyeksi peserta didik pada tahun 2015, APK<sub>2014</sub> adalah jumlah APK tahun 2014, rata-rata penurunan APK /100 adalah -4,1%, dan PUS (7-12)<sub>2015</sub> adalah jumlah proyeksi PUS (7-12) pada tahun 2015. Untuk menghitung jumlah proyeksi peserta didik pada tahun selanjutnya digunakan proyeksi PUS tahun

selanjutnya. Namun berdasarkan pada prinsip MDGs dan EFA yang mewajibkan APK atau APM 100% atau lebih maka pada tahun ajaran 2017/2018 sampai tahun ajaran 2019/2020 menggunakan APK 100%. Jadi berdasarkan APK maka, proyeksi Peserta didik keseluruhan (jumlah seluruh siswa), pada tahun 2015/2016 adalah 40440 siswa, pada tahun 2016/2017 adalah 39757 siswa, pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 40671 siswa, pada tahun ajaran 2018/2019 adalah 41194 siswa, pada tahun ajaran 2019/2020 adalah 42141 siswa.

b. *Proyeksi Jumlah Peserta Didik Baru setiap Kecamatan kota Cirebon Pada Tahun 2015-2019*

Perubahan penduduk usia masuk sekolah dasar yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2014, didasarkan pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk usia sekolah pada setiap tahunnya yaitu sekitar 0,86 %, selain itu kota Cirebon merupakan kota yang sedang berkembang dengan letak geografis yang strategis di wilayah III, sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota Cirebon, sehingga permintaan dokumen kependudukan yang terus meningkat sehingga data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon terus bertambah (Dcp.W.1).

Adapun rekapitulasi proyeksi jumlah peserta didik sekota Cirebon, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Proyeksi Jumlah Peserta Didik Kelas I-VI Tahun Pelajaran 2015/2016-2019/2020 Kota Cirebon

No	Tahun	Kelas						Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2015/2016	5961	6030	6284	6104	5943	5964	36286
2	2016/2017	5888	5961	6030	6284	6104	5943	36210
3	2017/2018	5815	5888	5961	6030	6284	6104	36082
4	2018/2019	5741	5815	5888	5961	6030	6284	35719
5	2019/2020	5663	5741	5815	5888	5961	6030	35098

c. *Jumlah Ruang Kelas yang dibutuhkan SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Kebutuhan ruang kelas di kota Cirebon secara keseluruhan menggunakan data proyeksi APK pada setiap SD dan MI, menggunakan standar pelayanan minimal pendidikan (SPMP), berdasarkan pada 1000 penduduk per satu sekolah dikombinasikan dengan rasio perkelas 32 peserta didik, dengan jumlah ruangan kelas minimal dalam satu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah

terdiri dari 6 ruang kelas maka, jumlah SD/MI yang masih dibutuhkan oleh kota Cirebon pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 29 SD/MI, tahun ajaran 2016/2017 adalah 25 SD/MI, tahun ajaran 2017/2018 adalah 30 SD/MI, tahun ajaran 2018/2019 adalah 33 SD/MI, dan tahun ajaran 2019/2020 adalah 37 SD/MI.

Kebutuhan ruang kelas di kota Cirebon secara keseluruhan menggunakan data proyeksi

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Ta. 2015/2016

No	Kecamatan	Tahun Ajaran 2015/2016							
		Rombel	RK. Layak	RB	Rasio	R.KLS	RK	RKB	Rehab
1	Kejaksan	256	201	7	1	256	-48	-41	-7
2	Kesambi	392	323	8	1	392	-61	-53	-8
							-		
3	Harjamukti	396	259	23	1	396	114	-91	-23
4	Lemahwungkuk	155	171	8	1	155	+24	+32	-8
5	Pekalipan	97	75	4	1	97	-18	-14	-4
	Jumlah	1296	1029	50	1				

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas Ta. 2016/2017-2019/2020

No	Kecamatan	Tahun Ajaran 2016/2017				Kecamatan	Tahun Ajaran 2017/2018			
		Rombel	R.KLS Layak	Rasio	RKB		Rombel	R.KLS Layak	Rasio	RKB
1	Kejaksan	251	256	1	+5	Kejaksan	244	256	1	+12
2	Kesambi	393	392	1	-1	Kesambi	394	392	1	-2
3	Harjamukti	400	396	1	-4	Harjamukti	405	396	1	-9
4	Lemahwungkuk	153	155	1	+2	Lemahwungkuk	149	155	1	+6
5	Pekalipan	97	97	1	0	Pekalipan	96	97	1	+1
	Jumlah	1294	1296	1			1288	1296	1	

  

No	Kecamatan	Tahun Ajaran 2018/2019				Kecamatan	Tahun Ajaran 2019/2020			
		Rombel	R.KLS Layak	Rasio	RKB		Rombel	R.KLS Layak	Rasio	RKB
1	Kejaksan	237	256	1	+19	Kejaksan	229	256	1	+27
2	Kesambi	393	392	1	-1	Kesambi	389	392	1	+3
3	Harjamukti	403	396	1	-7	Harjamukti	398	396	1	-2
4	Lemahwungkuk	146	155	1	+9	Lemahwungkuk	141	155	1	+14
5	Pekalipan	96	97	1	+1	Pekalipan	97	97	1	0
	Jumlah	1275		1			1254		1	

d. *Estimasi Jumlah Biaya Ruang Kelas SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Estimasi berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan luas persiswa 2 meter dikalikan 28 siswa atau 64 meter persegi yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (BDP.W.1) dan untuk menghitung jumlah biaya rehab ruang kelas rusak berat yaitu menggunakan persamaan (3.24) dan Persamaan (3.25). Berdasarkan harga satuan biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh dinas PU kota

Cirebon tahun 2015, yaitu sebesar Rp.1.867.983/m<sup>2</sup> atau biaya konstruksi per unit sebesar Rp.119.500.912/unit RKB. Perhitungan ini digunakan untuk pembiayaan yang dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Dana alokasi khusus atau (DAK) tahun anggaran 2015.

- a) Estimasi Jumlah Biaya Ruang Kelas yang Diperlukan Pada Setiap Kecamatan di Kota Cirebon Pada Tahun 2015-2019 Berdasarkan SPMP

Tabel 4. Perhitungan Biaya RKB SPMP Berdasarkan HPS dan Hasat PU

Tahun	RK <sub>minimal</sub>	Kebutuhan $\sum$ Kebutuhan			HPS	Biaya RKB	Hasat PU	Biaya RKB
		SD	RK	RK				
2015/2016	6	29	174	174	150,000,000	26,100,000,000	119,550,912	20,801,858,688
2016/2017	6	25	150	-24	150,000,000	0	119,550,912	0
2017/2018	6	30	180	6	150,000,000	900,000,000	119,550,912	717,305,472
2018/2019	6	33	198	18	150,000,000	2,700,000,000	119,550,912	2,151,916,416
2019/2020	6	37	222	24	150,000,000	3,600,000,000	119,550,912	2,869,221,888

- b) Estimasi Jumlah Biaya Ruang Kelas yang Diperlukan Pada Setiap Kecamatan di Kota Cirebon Pada Tahun 2015-2019 Berdasarkan SNP

Tabel 5. Perhitungan Biaya RKB Berdasarkan HPS TA.2015

Kecamatan	Kebutuhan Ruang kelas			Biaya Per Unit (ribuan)		Total biaya		
	RK	RKB	Rehab	HPS	% RB	RKB	Rehab	Total Anggaran
	Kejaksan	48	41	7	150,000	65%	6,150,000	682,500
Kesambi	61	53	8	150,000	65%	7,950,000	780,000	8,730,000
Harjamukti	114	91	23	150,000	65%	13,650,000	2,242,500	15,892,500
Lemahwungkuk	0	0	8	150,000	65%	0	780,000	780,000
Pekalipan	18	14	4	150,000	65%	2,100,000	390,000	2,490,000
	241	199	50			29,850,000	4,875,000	34,725,000

Tabel 6. Perhitungan Biaya RKB Berdasarkan HPS TA.2016-2019 \*dalam ribuan

Tahun Ajaran 2016/2017					Tahun Ajaran 2017/2018				
Kecamatan	Rkb	Hps	Rkb	Total Anggaran	Kecamatan	Rkb	Hps	Rkb	Total Anggaran
Kejaksan	0	150,00	0	0	Kejaksan	0	150,00	0	0
Kesambi	1	150,00	150,000	150,000	Kesambi	2	0	300,000	300,000
Harjamukti	4	150,00	600,000	600,000	Harjamukti	9	0	1,350,00	1,350,000
Lemahwungkuk	0	150,00	0	0	Lemahwungkuk	0	150,00	0	0
Pekalipan	0	150,00	0	0	Pekalipan	0	150,00	0	0
				750,000					1,650,000
Tahun Ajaran 2018/2019					Tahun Ajaran 2019/2020				
Kecamatan	Rkb	Hps	Rkb	Total Anggaran	Kecamatan	Rkb	Hps	Rkb	Total Anggaran
Kejaksan	0	150,00	0	0	Kejaksan	0	150,00	0	0
Kesambi	1	150,00	150,000	150,000	Kesambi	0	150,00	0	0
Harjamukti	7	150,00	1,050,000	1,050,000	Harjamukti	2	150,00	300,000	300,000
Lemahwungkuk	0	150,00	0	0	Lemahwungkuk	0	150,00	0	0
Pekalipan	0	150,00	0	0	Pekalipan	0	150,00	0	0
				1,200,000					300,000

Tabel 7. Perhitungan Biaya RKB Berdasarkan Hasat PU TA.2015

Kecamatan	Kebutuhan Ruang kelas			Biaya Per Unit (ribuan)		Total biaya		
	RK	RKB	Rehab	Hasat PU	BK R	RKB	Rehab	Total Anggaran
	Kejaksan	48	41	7	119,550,91	65%	4,901,587,392	543,956,650
Kesambi	61	53	8	119,550,91	65%	6,336,198,336	621,664,742	6,957,863,078
Harjamukti	114	91	23	119,550,91	65%	10,879,132,99	1,787,286,13	12,666,419,12
Lemahwungkuk	0	0	8	119,550,91	65%	2	4	6
Pekalipan	18	14	4	119,550,91	65%	0	621,664,742	621,664,742
	241	199	50			23,790,631,48	3,885,404,64	27,676,036,12
						8	0	8

Tabel 8. Perhitungan Biaya RKB Berdasarkan Hasat PU TA.2016-2019

TAHUN AJARAN 2016/2017					TAHUN AJARAN 2017/2018					
Kecamatan	RKB	HPS	RKB	Total		RKB	HPS	RKB	Total	
				Anggaran	RKB				Anggaran	RKB
Kejaksan	0	119,550,912	0	0	0	0	119,550,912	0	0	0
Kesambi	1	119,550,912	119,550,912	119,550,912	2	119,550,912	239,101,824	239,101,824		
Harjamukti	4	119,550,912	478,203,648	478,203,648	9	119,550,912	1,075,958,208	1,075,958,208		
Lemahwungkuk	0	119,550,912	0	0	0	119,550,912	0	0		
Pekalipan	0	119,550,912	0	0	0	119,550,912	0	0		
				597,754,560					1,315,060,032	
TAHUN AJARAN 2018/2019					TAHUN AJARAN 2019/2020					
KECAMATAN	RKB	HPS	RKB	Total		RKB	HPS	RKB	Total	
				Anggaran	RKB				Anggaran	RKB
Kejaksan	0	119,550,912	0	0	0	119,550,912	0	0	0	0
Kesambi	1	119,550,912	119,550,912	119,550,912	0	119,550,912	0	0	0	0
Harjamukti	7	119,550,912	836,856,384	836,856,384	2	119,550,912	239,101,824	239,101,824		
Lemahwungkuk	0	119,550,912	0	0	0	119,550,912	0	0	0	0
Pekalipan	0	119,550,912	0	0	0	119,550,912	0	0	0	0
				956,407,296					239,101,824	

e. *Pengadaan Anggaran Ruang Kelas SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Pengadaan anggaran dalam pembangunan fasilitas pendidikan ruang kelas baru maupun rehab, pada tahap awal adalah melalui proses perencanaan dari pihak pemerintah kota Cirebon. Dinas yang terkait dengan perencanaan dalam pembangunan di kota Cirebon di serahkan pada BAPEDA atau badan perencanaan daerah kota

Cirebon. Prosedur dalam pengajuan anggaran biaya pembangunan ruang kelas baru diawali dari proses perencanaan awal di dinas pendidikan kota Cirebon, melalui staf dan kasi sarpras dan disetujui oleh Kabid Sarpras dan Kepala Dinas pendidikan kota Cirebon. Pada tahap perencanaan ini digunakan dua prosedur dalam penentuan kebutuhan pembangunan ruang kelas.

## PEMBAHASAN

a. *Proyeksi Jumlah Penduduk Total, PUS (7-12) tahun, PUMS (6-7), Peserta Didik Baru berdasarkan APK kota Cirebon tahun 2015-2019*

Sesuai dengan teori *social demand* yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, penulis membutuhkan satu model dan teknik untuk memproyeksikan tujuan dan meramalkan perkembangan sistem sosial dan ekonomi setiap saat. Proyeksi penduduk atau peramalan kependudukan, sebagai dasar untuk perencanaan komprehensif, perubahan sistem sosial dan ekonomi sebagai ukuran dan karakteristik struktural dari perubahan penduduk. Proyeksi kependudukan juga digunakan untuk mengestimasi peserta didik yang masuk di sekolah di masa depan. Dan sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah pendaftaran berikutnya. Proyeksi penduduk juga sebagai pendukung dari berbagai peramalan dan proyeksi ekonomi.

Komponen dasar untuk model proyeksi penduduk adalah menghitung dasar struktur penduduk tahun awal berdasarkan jenis kelamin

dan usia, kemudian menghitung rata-rata kematian dan kelahiran serta migrasi sebagai faktor dasar yang menentukan dalam membuat sebuah estimasi atau peramalan.

Dari teori ini maka, dengan adanya proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon kita bisa mengetahui dan membuat perhitungan mengenai kebutuhan prasarana yang diperlukan seiring dengan perkembangan penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang mencapai laju penduduk sebesar 2,3% pertahun. Hal ini sesuai dengan prinsip *social demand* dan target *Milenium Development Goals 2015*, arah kebijakan dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan, juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi DAKAR tentang EFA, Konvensi Hak Anak, MDGs, *Summit on Sustainable Development* Pembangunan Milenium (MDGs), poin kedua adalah "Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua". Target angka partisipasi murni atau APM atau APK di Indonesia mencapai 100% pada tahun 2015.



Sesuai dengan teori *social demand* dalam perencanaan pendidikan yang paling sederhana adalah target perencanaan pendidikan yang didasarkan pada proyeksi penduduk/pendaftaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis (1980, hlm. 44) "*educational plan targets are set by estimating the number in identifiable population group who will receive give a mount of schooling or "education"*". Dengan kata lain inti dari metode ini adalah proyeksi penduduk, hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan masalah yang muncul baik secara teoritis maupun metodologi dalam pendekatan *social demand* dengan analisis kependudukan dan proyeksi penduduk. Hal ini dikuatkan dengan "*the projection of an educational enrollment target for a plan is based on the mechanistic analysis of trend, which is then extrapolated*". Pendekatan *social demand* dalam perencanaan pendidikan juga memiliki tujuan berdasarkan nilai sosial seperti pemerataan dan keadilan dalam mendapatkan pendidikan.

*b. Proyeksi Jumlah Peserta Didik Baru setiap Kecamatan kota Cirebon Pada Tahun 2015-2019*

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menyusun proyeksi siswa, proyeksi setiap tahunnya dihitung dengan menggunakan kenaikan atau penurunan dari hasil angka penyerapan kasar sehingga diperoleh hasil proyeksi sampai tahun yang diinginkan. Jika ASK menurun maka supaya digunakan metode lain karena ASK yang menurun akan menghasilkan proyeksi siswa yang turun pula. Namun metode ASK hanya digunakan untuk membuat proyeksi peserta didik baru saja atau satu tingkat. Maka didapatkan hasil penelitian yang menurun pada setiap tahunnya di setiap kecamatan di kota Cirebon. Hal ini didasarkan karena jumlah peserta didik yang diproyeksikan hanya yang terdaftar di sekolah dasar negeri dan swasta di kota Cirebon saja tidak menghitung proyeksi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala Dinas pendidikan kota Cirebon (KDP.W.1) menunjukkan bahwa alasan menurunnya jumlah peserta didik di kota Cirebon karena rendahnya angka serap kasar penduduk usia masuk sekolah, kemudian faktor kebijakan kota Cirebon yang mewajibkan penduduk usia 7 tahun yang wajib diterima sebagai peserta didik baru di kota Cirebon dengan dibuktikan oleh akta kelahiran dan berdomisili di kota Cirebon. Selain itu adanya pembatasan kuota bagi penduduk kota dan diluar kota Cirebon yang ditetapkan oleh peraturan walikota tentang PPDB tahun 2010 sampai tahun 2014 sehingga terjadinya penurunan jumlah peserta didik yang masuk ke kota Cirebon.

Selain itu adanya pembangunan madrasah ibtidaiyah (MI) yang cukup pesat di kota Cirebon selama 6 tahun terakhir. Dari jumlah awal MI hanya ada satu MI dengan status negeri, bertambah 19 MI baru yang berstatus swasta yang mengakibatkan terjadinya penyebaran penduduk usia masuk sekolah untuk memasuki lembaga pendidikan dasar lain selain lembaga yang dibawah dinas pendidikan kota Cirebon yaitu SD negeri dan SD swasta (KDP.W.1). Maka pada dasarnya di kota Cirebon tidak mengalami penurunan penerimaan peserta didik baru, karena terjadi penurunan penerimaan PDB hanya terjadi di lingkungan dinas pendidikan kota Cirebon artinya terjadi di SD negeri dan SD swasta. Hal ini tidak terjadi di Madrasah Ibtidaiyah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah peserta didik baru.

*c. Jumlah Ruang Kelas yang dibutuhkan SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Dari hasil penelitian mengenai jumlah ruang kelas yang dibutuhkan di setiap Sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di setiap kecamatan kota Cirebon, menunjukkan fakta bahwa pada tahun ajaran 2014/2015 kota Cirebon masih kekurangan prasarana pendidikan berupa ruang kelas baru dan ruang kelas rehabilitasi rusak berat. Berdasarkan perhitungan proyeksi yang dilakukan pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah ruang kelas yang harus dibangun sebanyak 241 ruang kelas dengan rincian 199 ruang kelas baru dan 50 ruang kelas rehab. Kemudian pada tahun ajaran 2016/2017 kota Cirebon masih akan kekurangan ruang kelas baru sebanyak 5 unit RKB, pada tahun ajaran 2017/2018 kota Cirebon masih akan kekurangan ruang kelas baru sebanyak 11 unit RKB, pada tahun ajaran 2018/2019 kota Cirebon masih akan kekurangan ruang kelas baru sebanyak 8 unit RKB dan pada tahun ajaran 2019/2020 kota Cirebon masih akan kekurangan ruang kelas baru sebanyak 2 unit RKB.

Berdasarkan teori proyeksi pada penelitian ini, untuk membuat proyeksi siswa banyak menggunakan metode arus siswa atau *Flow Rate* karena hasil proyeksi menggunakan metode ini yang paling mendekati keadaan karena berbagai parameter dan indikator pendidikan. Metode arus siswa atau *flow rate* adalah metode proyeksi yang mengikuti ke mana siswa dalam satu jenjang pendidikan dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam arus siswa secara makro terdapat tiga arus dari setiap tingkat, yaitu 1) angka mengulang, 2) angka naik tingkat, dan 3) angka putus sekolah sehingga setiap siswa di tingkat I pada tahun mendatang akan terjadi siswa mengulang di tingkat I, siswa naik ke tingkat II, dan siswa yang putus sekolah di tingkat I.

Berdasarkan hasil penelitian, proyeksi kebutuhan prasarana atau ruang kelas, dilakukan berdasarkan metode *flow rate projection* dengan asumsi target. Asumsi target digunakan karena pendekatan *social demand* lebih berfokus dengan persamaan sebagai target atau tujuan perencana, dari pada sebagai standar yang menjadi sistem yang memonitor secara terus meAPKus dan mengalihkan tujuan ketika penilaian menunjukkan penyimpangan sehingga seluruh penduduk terutama penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan dan dengan tujuan *automatic promotion* tanpa ada mengulang atau tinggal kelas (Issah, dkk. 2007). Sehingga didapatlah proyeksi yang menggabungkan dengan informasi keadaan atau proporsi jumlah peserta didik pada tahun sebelumnya.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arun C Mehta, yang berjudul *Projection of Population, Enrolment and Teacher* dengan menggunakan *Enrolment Projection Based On Method Of Least Squared*. Penelitian ini lebih didasarkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk usia masuk sekolah dan pertumbuhan penduduk usia sekolah. Sehingga didapatkan dua standar yang dipakai yaitu Standar pelayanan minimal pendidikan yang menitik beratkan pada pendekatan *social demand*, dan sekaligus pencapaian standar nasional pendidikan yang didasarkan pada proyeksi *flow rate* dengan target MDGs yang bersumber pada data eksisting yang tersedia.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Arun C Mehta (2010) dan Ono Wiharna (2007) yang berjudul *Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Kewilayahan*, hanya sebatas pada penelitian proyeksi jumlah peserta didik pada lima tahun proyeksi dan proyeksi jumlah tenaga pendidikan yang dibutuhkan, pada penelitian ini membahas mengenai proyeksi jumlah peserta didik pada lima tahun proyeksi dan dampaknya bagi kebutuhan prasarana atau ruang kelas yang dibutuhkan sesuai dengan hasil proyeksi jumlah peserta didik yang terserap.

Adapun kriteria Ruang kelas berdasarkan SNP yaitu :

- 1) Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar
- 2) Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik
- 3) Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang kelas adalah 5m.

#### d. *Estimasi Jumlah Biaya Ruang Kelas SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Untuk menghitung biaya satu unit ruang kelas didasarkan atas dua harga satuan yaitu berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan berdasarkan DAK yaitu harga satuan (Hasat PU). Semua informasi ini telah terkonfirmasi dari setiap narasumber yang diwawancarai dengan jawaban informasi yang seragam.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2015, pasal 5 ayat 2 yaitu “a. rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya; b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya”. Artinya pada peraturan ini ditegaskan bahwa DAK atau Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 diperuntukan untuk membangun ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas. Dengan kata lain, DAK bisa dijadikan acuan dalam menentukan perhitungan biaya ruang kelas baru, sekaligus menjadi sumber anggaran dalam pembangunan RKB dan rehabilitasi.

Selain menggunakan peraturan DAK, dalam perhitungan estimasi biaya untuk membuat anggaran dalam membangun satu unit ruang kelas baru, ditetapkan berdasarkan pada peraturan dari dinas cipta karya yang ditetapkan pada Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang peraturan pelelangan dan pembangunan oleh pihak ketiga.

Lain halnya dengan estimasi biaya dengan menggunakan HPS, perhitungan estimasi biaya dalam membangun satu unit ruang kelas baru juga di tentukan oleh harga satuan yang dikeluarkan Dirjen Cipta Karya dalam Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor 144/C/KP/2015 tentang petunjuk pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2015, dan lampiran A surat Direktur penataan bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:BU.0106-Cb./1836 tanggal 13 November 2014, yaitu biaya harga satuan konstruksi per meter persegi untuk kota Cirebon adalah Rp.1.867.983/m<sup>2</sup> dengan biaya satu unit pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 119.550.912/RKB, dengan ketentuan luas RKB 64m<sup>2</sup>, dengan spesifikasi bahan dan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar yang tertera pada peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor 144/C/KP/2015.

Berdasarkan perhitungan estimasi biaya pembangunan RKB yang diperlukan oleh kota Cirebon pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 27.676.036.128; hal ini didasarkan pada perhitungan Hasat PU.

e. *Pengadaan Anggaran Ruang Kelas SD di kota Cirebon pada tahun 2015-2019*

Dalam prosedur atau alur pengajuan anggaran dilakukan melalui perencanaan dari SKPD dalam hal ini Dinas pendidikan Kota Cirebon. Dinas pendidikan membawa rancangan perencanaan kebutuhan RKB dan biaya yang dibutuhkan berdasarkan HPS dan mempertimbangkannya dengan BAPEDA kota Cirebon untuk memfasilitasi pengajuan ke pemerintah kota Cirebon. Dari Bapeda kemudian (bersama SKPD) diajukan ke DPRD dan Walikota untuk menjadi rancangan KUAPPAS (berbentuk

Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

Setelah terbentuk KUAPPAS maka DPRD melakukan proses lelang dengan pihak ketiga berdasarkan Permen PU No.07/PRT/M/2011 dengan menggunakan HPS. Kemudian setelah KUAPPAS terbentuk maka dinas pendidikan menyiapkan RKA atau rencana kerja anggaran yang didalamnya memuat sekolah mana saja yang akan mendapatkan RKB dan Rehabilitasi. Setelah RKA terbentuk dan pihak ketiga pemenang lelang akan bersama-sama membangun RKB sesuai dengan peraturan dan RKA dari SKPD.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum proyeksi penduduk kota Cirebon dari tahun 2015-2019 akan terus mengalami kenaikan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) dan penduduk usia sekolah (7-12 tahun) akan berdampak langsung bagi peningkatan jumlah peserta didik yang wajib terlayani oleh lembaga pendidikan dasar.

Jumlah peserta didik yang terserap oleh lembaga pendidikan dasar ditentukan oleh tingkat angka serap kasar (ASK) yang menjadi indikatornya adalah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) di setiap kecamatan. Jumlah peserta didik secara keseluruhan sekota Cirebon yang pada setiap tahunnya telah diproyeksikan akan meningkat dapat berdampak pada kebutuhan jumlah prasarana atau ruang kelas yang dibutuhkan. Jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada tahun 2015 yang dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan atau SPMP mencapai 177 unit RKB. Sedangkan, jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada tahun 2015 yang dihitung berdasarkan SNP mencapai 199 unit RKB dan 50 unit ruang kelas rusak berat yang harus direhabilitasi.

Jumlah kebutuhan ruang kelas akan terus berkurang pada setiap tahun berikutnya apabila pada tahun pertama proyeksi (tahun 2015), dilakukan tindak lanjut dengan pembangunan

secara bertahap. Jumlah estimasi biaya dalam pembangunan satu unit RKB dapat menggunakan dua formula perhitungan. Perhitungan pertama dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri atau (HPS) yang didasarkan pada peraturan dari dinas cipta karya yang ditetapkan pada Permen PU Nomor.07/PRT/M/2011 pasal 6. Sedangkan perhitungan kedua menggunakan harga satuan atau Hasat PU yang didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan Dirjen Cipta Karya dalam Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor 144/C/KP/2015 tentang petunjuk pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2015, dan lampiran A surat Direktur penataan bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:BU.0106-Cb./1836 tanggal 13 November 2014.

Pengadaan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak berat, dapat dilakukan dengan pengajuan rencana kerja anggaran oleh dinas pendidikan melalui Bapeda, untuk diajukan kepada pemerintah kota melalui DPRD dengan KUAPPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Selain itu, dari pemerintah pusat melalui APBN dengan memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aref, A. (2011). Perceived impact of education on Poverty reduction in rural Areas of iran. *Life Science Journal* 8 (2), 489-501.

Adams, D. (2006). *Educational Planning: Differing Models*. University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA : Elsevier Inc. All rights reserved

Assadullah, M.N. (2009). Return to private and public education in bangladesh and Pakistan : A comparative analysis. *Journal of Asian Economics*, 20(1), 77-86

Banghart, F.W and Trull, A. (1990). *Educational Planning*. New York : The MacMillan Company

- Bayou, J and C. Gouel. Sauvageot C. (2005). Projection of net enrolment rates of primary school age children, gender in primary and secondary levels for 2015. *Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2006, Literacy for Life*
- Dash, M & Neena Dash. (2008). *School Management*. New Delhi : Atlantic Publishing Corporation.
- Davis, Russell G. (1980a). *Planning Education For Development Volume I*. Massachusetts : Center for Studies in Education and Development Harvard Graduate School of Education
- Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:BU.0106-Cb./1836 tanggal 13 November 2014.
- Grip, Richard S. (2004). Projecting Enrollment in Rural Schools : A Study of Three Vermont School Districts. *Journal of Research in Rural Education, 2004, 19 (3)*.1-6.
- Isaah, Madeez Adamu, dkk.(2007). *Achieving Universal Primary Education In Ghana By 2015: A Reality Or A Dream?*. New York : UNICEF 3 UN Plaza, NY, NY 1001 7
- Kemdikbud. (2011). *Panduan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar Akses (PBPSA) Decentralized Basic Education I Management and Governance*. Jakarta: Kemdikbud
- Kumar, Ashok. (2004). *Current Trend in Indian Education*. New Delhi : APH Publishing Corporation
- Lasker, R.D., dkk. (2001). Partnership Synergy : A Practical Framework For Studying And Strengthening The Collaborative Advantage. *Milbank Quarterly, 79(2)*, 179-205.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 tentang SNP
- Permen PU No.07/PRT/M/2011, tentang Standard dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Sa'ud, dan Makmun. (2013). *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Joko, dkk. Evaluasi Skala Pelayanan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Rekayasa Sipil*. Volume 6, no.2-2012 ISSN 1978-5658. Hlm 156-167
- Subekti, Solving dan Supriharjo, Rina D. (2014). Konsep Optimalisasi Distribusi Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Teknik Pomits Vol. 3 No.2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 print)*
- Talpur, M.A.H, Napiyah, M, at all. (2014). Analyzing Public Sector Education Facilities : a Step Further Towards Accessible Basic Education Institutions In Destitute Subregions. *International Education Studies Canadian center of Science and Education; vol. 7, No. 4; ISSN 1913-9020, E-ISSN 1913-9039*.
- Tre'panier, M, Chapleu R & Morency, C (2008). Tool and Methods for a transportation household survey. *Urban & Regional Information Systems Association (URISA)*, 20(2008).
- Unesco .(2010). *Module 5 Projections and Scenario Building*. Paris : International Institute for Educational Planning.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wiharna, Ono. (2007). Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Kewilayahan. *Mimbar Pendidikan No. 1/XXVI/2007*. Hlm 63-71.